MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal A. Yani Kav.58 (Lt. 9 – 10) By Pass Jakarta 10510 PO BOX 1148
Telepon: (021) 29079177 (Hunting) Fax (021) 3505193
Laman: *https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id*

SURAT TUGAS

Nomor : 200/DjMT.1/Ratgas/KP.01.3/VII/2023

Menimbang : Dalam rangka Penyusunan Pedoman Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara untuk mewujudkan keberhasilan penanganan dan pengawasan eksekusi putusan yang efektif, efisien dan tuntas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Perdilan Tata Usaha Negara Nomor 217/DjMT/KEP/OT.01.4/VII/2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Eksekusi Putusan Peradilan Tata usaha Negara.

Memberi Tugas

Kepada :

Nama	:	Welly Walbarkah, S.Kom
NIP	:	198507202015031002
Pangkat	:	Penata (III/c)
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi, Badilmiltun

Untuk :

1. Melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan Kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang bertempat di Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada, an IHG Hotel, Jl. Gajah Mada No.211, RT.14/RW.1, Glodok, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Bara pada tanggal 26 sd. 28 Juli 2023;
2. Segala biaya dibebankan pada DIPA Ditjen Badilmiltun Nomor SP DIPA-005.05.1.663122/2023 Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 November 2022;
3. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2023

Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara,

Ach. Jufri

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal A. Yani Kav.58 (Lt. 9 – 10) By Pass Jakarta 10510 PO BOX 1148
Telepon: (021) 29079177 (Hunting) Fax (021) 3505193
Laman: *https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id*

SURAT TUGAS

Nomor : ٨٠٠/DjMT.1/Ratgas/KP.01.3/VII/2023

Menimbang : Dalam rangka Penyusunan Pedoman Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara untuk mewujudkan keberhasilan penanganan dan pengawasan eksekusi putusan yang efektif, efisien dan tuntas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Perdilan Tata Usaha Negara Nomor 217/DjMT/KEP/OT.01.4/VII/2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Eksekusi Putusan Peradilan Tata usaha Negara.

Memberi Tugas

Kepada :

Nama	:	Welly Walbarkah, S.Kom
NIP	:	198507202015031002
Pangkat	:	Penata (III/c)
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi, Badilmiltun

Untuk :

1. Melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan Kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang bertempat di Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada, an IHG Hotel, Jl. Gajah Mada No.211, RT.14/RW.1, Glodok, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Bara pada tanggal 26 sd. 28 Juli 2023;
2. Segala biaya dibebankan pada DIPA Ditjen Badilmiltun Nomor SP DIPA-005.05.1.663122/2023 Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 November 2022;
3. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ٢٩ Juli 2023

Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara,

Ach. Jufri

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Nomor : 217/DjMT/KEP/OT.01.4/VII/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PEDOMAN EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa salah satu indikator kinerja pengadilan dalam penegakan hukum dan keadilan adalah keberhasilan penanganan dan pengawasan eksekusi putusan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Tata Usaha Negara;

b. bahwa saat ini belum terdapat pedoman terkait penanganan permohonan dan pengawasan eksekusi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu perlu dibentuk kelompok kerja penyusunan Pedoman Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara, sehingga eksekusi dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tuntas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Peradilan Bidang Kejurusitaan Pada Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-005.05.1. 663122/2023 tanggal 30 November 2022 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PEDOMAN EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA;

KESATU : Menetapkan penyelenggaraan Kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Jakarta tanggal 26 – 28 Juli 2023;

KEDUA : Menunjuk Panitia Kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Lampiran I Keputusan ini;

KETIGA : Menunjuk Tim Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara T.A. 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung R.I.;
2. Y.M. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I.;
3. Y.M. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I.;
4. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I.;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Nomor : 217/DjMT/KEP/ OT.01.4/VII/2023
Tanggal : 7 Juli 2023

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PEDOMAN EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	N A M A	N.I.P	JABATAN
1	Penasehat	H. Bambang Myanto, S.H., M.H.	196805231992121002	Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI
2	Penanggung Jawab	Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H.	196907141991031006	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN
3	Ketua Pelaksana	Sudiyono, S.H., M.H.	197012191998031003	Kasubdit Pembinaan Administrasi Diltun
4	Sekretaris	Meylan, S.Sos., M.M.	197905112009122003	Kasi Tata Kelola Diltun
5	Notulen	Safira Salsabila, S.H.	199507062022032010	Analis Perkara Peradilan
6	Seksi Administrasi	Intan Sari Widya Ningrum, S.H., M.H.	199008282012122003	Kasi Statistik Dan Dokumentasi Diltun
7	Seksi Keuangan	Rahmawati Sukma Wardani, A.Md.Kb.N.	200003062022012004	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil, Sub. Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran Sesditjen Badilmiltun
8	Seksi TI	Dwianto Budiman, S.E., M.M.	198408112009041003	Kasi Bimbingan dan Monitoring Diltun
9	Seksi Dokumentasi	Yudo Ari Kasdaroyo	197505151999031001	Penyaji Data dan Publikasi

Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Nomor : 217/DjMT/KEP/ OT.01.4/VII/2023
Tanggal : 7 Juli 2023

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PEDOMAN EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	NAMA		N.I.P	JABATAN
1	Ketua Tim Pokja	Oenoen Pratiwi, S.H., M.H.		197210261992032001	Ketua PTUN Jakarta
2	Anggota	1	Husban, S.H., M.H.	197212231992031002	Ketua PTUN Surabaya
		2	Kusman, S.IP., S.H., M.Hum	197005151991031012	Ketua PTUN Serang
		3	Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H	197608102000121001	Ketua PTUN Yogyakarta
		4	Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H.	197612042001122002	Wakil Ketua PTUN Bandung
		5	Dr. Sudarsono, S.H., M.H.	197605032006041004	Hakim Yustisial Kepaniteraan MA RI
		6	Dr. Enrico Simanjuntak, S.H., M.H.	198101272006041003	Hakim PTUN Bandung
		7	Dikdik Somantri, S.H., S.IP. M.H.	197302272006041001	Hakim PTUN Jakarta
		8	Dr. M. Ikbar Andi Endang, S.H., M.H.	198008112007041002	Hakim Yustisial pada Balitbangdiklatkumdil MA RI
		9	Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H.	198401032009121002	Hakim Yustisial Kepaniteraan MA RI
		10	Dhonni Adhita Saputra, S.H.	197310122000031003	Panitera PTUN Serang
		11	Sri Hartanto, S.H,.M.Kn.	197004111991031004	Panmud Perkara PTUN Jakarta

Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"